

TESIS

PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

ANDI SETIAWAN, S.H.

NPM : 22310028

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2024**

TESIS
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI

Diajukan oleh:

ANDI SETIAWAN
NPM : 22310028

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 15 Juli 2024

Oleh

Pembimbing I


Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

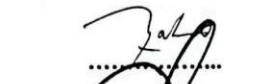
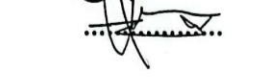
T E S I S
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANDI SETIAWAN
NPM : 22310028

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda-Tangan
Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister

Tanggal, 25 Juli 2024

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

MOTTO

“

Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

-Winston Churchill-

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan sabar.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
5. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar

saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.

7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.

Akhir kata, harapan penulis semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 1 Juli 2024
Yang menyatakan,

ANDI SETIAWAN, S.H.
NPM : 22310028

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andi Setiawan

NPM : 22310028

Alamat : Wonorejo Timur B/41 Rungkut, Surabaya

No. Telp (HP) : 085746607178

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarism* maupun *autoplagerisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 1 Juli 2024

Yang menyatakan,



ANDI SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSETUJUAN TESI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Tipe Penelitian	18
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	20
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II SISTEM KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMILU	23
2.1 Pemilu Sebagai Kerangka Demokrasi	23
2.2 Penyelenggara Pemilu.....	29
2.3 Sistem Keadilan Elektoral	38
2.4 Sengketa Proses Pemilu	42
2.5 Penundaan Pemilu	45
2.6 Penulis Berpendapat	50

BAB III KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MELAKUKAN PENUNDAAN PEMILU	53
3.1 Kompetensi Mengadili Pengadilan Negeri.....	53
3.2 Kebebasan Hakim	55
3.3 Res Judicata Pro Veritate Habetur.....	59
3.4 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penyelenggara Negara.....	63
3.5 Putusan Penundaan Pemilu	66
3.6 Penulis Berpendapat.....	72
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR BACAAN	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1	14
TABEL 2.1	42
TABEL 2.2	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1	40

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri bertujuan untuk menganalisis apakah sistem keadilan elektoral dalam pemilu mengatur mengenai penundaan pemilu dan sekaligus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkrit apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa pemilu, khususnya melakukan Penundaan Pemilu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*legal research, rechtsonderzoek*), dengan menitikberatkan pada implementasi hukum khususnya berkaitan dengan pemilu dan kewenangan pengadilan, serta menggunakan pendekatan kasus, yakni Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis. Dengan demikian penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula tidak mengenal istilah data. Adapun dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat konstitusi secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun demikian, UU Pemilu mengatur adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa proses, bahkan melakukan penundaan pemilu sekalipun. Bahwa agar tidak terjadi lagi Putusan Penundaan Pemilu dikemudian hari, maka Mahkamah Agung harus memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para hakim Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Penundaan Pemilu, Pemilu, Kewenangan

ABSTRACT

The research entitled Postponement of General Elections through District Court Decisions aims to analyze whether the electoral justice system in elections regulates election postponements and at the same time aims to gain a more concrete understanding of whether District Courts have the authority to adjudicate election disputes, especially carrying out Election Postponements. This research uses a type of normative legal research (legal research, rechtsonderzoek), with an emphasis on legal implementation, especially relating to elections and court authority, and uses a case approach, namely Decision Number: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. This research is not intended to carry out verification to test hypotheses. Thus, legal research does not recognize the existence of hypotheses, nor does it recognize the term data. Meanwhile, in legal research the term legal materials is used. The results of this research show that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Election Law do not regulate the concept of postponing elections, considering that the constitution strictly stipulates that elections are held every five years. However, the Election Law regulates the existence of follow-up elections and supplementary elections. Apart from that, the results of this research show that the District Court has no authority to adjudicate process disputes, even to postpone elections. That in order to prevent further Election Postponement Decisions from occurring in the future, the Supreme Court must provide counseling and technical guidance to District Court judges.

Keywords: *Election Postponement, Election, Authority*